

Analisis Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap Produk Domestik Bruto Di Kabupaten Barru

Fitriana Akhsan

¹ Peternakan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi sektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan keunggulan dari sektor peternakan di Kabupaten Barru. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber data dari Dinas Perternakan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian yaitu Bidang Peternakan Kabupaten Barru, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru berupa data runtut waktu (time series) dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi. Terknik analisa data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis adalah Kontribusi dan Location Quotient (LQ). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Peternakan terhadap Produk Dometik Regioal Bruto (PDRB) Kabupaten Barru dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berkontribusi rata-rata sebesar 13,91 persen dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,7 persen, maka nilai $LQ > 1$ dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Sektor Peternakan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Barru

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Produk Domestik Bruto

Copyright (c) 2023 Fitriana Akhsan

-
- Corresponding Author :
Email Address : fitriana.akhsan@yahoo.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari kementerian pertanian prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau nasional mencapai 711,885 ton sedangkan ketersediaan mencapai 770.771 ton, data tersebut menunjukkan ketimpangan antara ketersediaan dengan kebutuhan sehingga harus dilakukan stimulus dalam memenuhi kebutuhan tersebut (kementan.id, 2023) .

Tabel 1 populasi ternak Kab.Barru

Kecamatan	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak			
	Sapo Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
	2021	2021	2021	2021

Tanete Riaja	11126	34	390	502
Pujananting	9272	97	988	439
Tanete Rilau	8654	32	286	1567
Barru	11744	9	312	1254
Soppeng Riaja	7417	4	234	564
Balusu	5563	-	208	1191
Mallusetasi	8036	2	182	752
Kabupaten				
Barru	61812	178	2600	6269

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel 1 tingginya potensi ekonomi dari subsektor peternakan tersebut perlu didorong untuk memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam budidaya sapi potong yang memiliki 87% kontribusi dari populasi ternak di kabupaten Barru, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai sumber protein alternatif bagi masyarakat, pengembangan peternakan sapi di Indonesia bertujuan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan, korporasi peternakan rakyat, membangun peternakan berbasis budaya, serta menjaga ketahanan ibadah.

Produk domestic bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara. Pada daerah kabupaten Barru tercatat Sepanjang 2022, Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian turut memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 34,3% dan juga mencatatkan pertumbuhan positif mencapai 4,3% (yoy). Subsektor peternakan sendiri juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,34% (yoy) dengan kontribusi sebesar 1,58% terhadap PDB (ekon.go.id.,2022).

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat kabupaten atau kota menggambarkan kemampuan kabupaten atau kota untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Sedangkan PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan provinsi untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Seribu, 2022). PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua (2) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan penilaian harga konstan didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun dasar 2010. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

Sedangkan Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

2.2 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Siwu, 2017:2).

2.3 1.5.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai tindakan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang menghasilkan tambahan output yang pada umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. PDB atau PDRB merupakan indikator atau tolok ukur keberhasilan ekonomi dari suatu negara atau daerah (Adisasmita, 2015:9). Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam nilai konstan (Nurmila et al., 2021:31).

2.4 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan

barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation) (Siwu, 2017:4). Kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya basis di dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan, begitu pula sebaliknya (Glason dalam Tambunan, 2011 dalam Nurmila et al. (2021: 32)). Kegiatan lain yang bukan basis disebut sektor non basis. Sektor non basis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan adalah sektor basis (Tarigan dalam Tambunan, 2011 dalam Nurmila et al. (2021: 32)).

2.5 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor unggulan berkaitan dengan suatu perbandingan baik pada skala regional, skala nasional, maupun internasional. Dalam skala internasional, dapat dikatakan sektor unggulan jika suatu sektor berdaya saing dengan sektor yang sama namun di negara lain. Sektor yang dianggap mampu memberi dampak baik pada sektor lain dalam artian sektor unggulan dengan cara mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya tersebut (Nurlina, Andini dan Sari, 2019, 25). Sektor unggulan adalah suatu sektor dimana dipengaruhi oleh keberadaan faktor endowment (endowment factor) yang mengalami perkembangan melalui kegiatan investasi sehingga menjadi fondasi ekonomi (Soeyanto & Faradita, 2018 dalam Kapur et al. (2022:61)). Menurut (Hajeri, Yurisinthae, dan Dolorosa, 2015) sektor unggulan adalah sektor yang mampu menjadi tumpuan atas tujuan yang diharapkan dari pembangunan ekonomi, dimana sektor ini menjadi penggerak perekonomian juga sebagai sektor kunci pada perekonomian regional. Kriteria yang dimiliki sektor utama adalah bervariasi. Kriteria dinilai berdasarkan seberapa besarnya peranan suatu sektor memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di suatu wilayah, relatif tinggi memiliki tingkat penyerapan akan tenaga kerja, secara linkage memiliki keterkaitan dengan sektor lain, dan sebagai sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang besar (Tarigan dalam Soeyatno, 2018 dalam Kapur et al. (2022:61)).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kab.Barru dengan periode penelitian mulai tahun 2017-2021, dengan lingkup lokasi penelitian meliputi Kabupaten Barru. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi: Gambaran Umum, Data Perekonomian Kabupaten Barru, dan Data Peternakan Kabupaten Barru periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Analisis kuantitatif berupa analisis matematis kontribusi dan analisis *Location Quotient*. Guna menghitung kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017, maka untuk menghitung

kontribusi PDRB subsektor peternakan terhadap PDRB menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PDRB SP}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

I.

dimana :

PDRB SP : PDRB Sektor Peternakan Kabupaten Barru

PDRB : Total PDRB Kabupaten Barru

Analisis LQ dari Bapenas, maka secara matematis menggunakan formula sebagai berikut :

$$LQ = \frac{xi/x}{XI/X}$$

dimana :

Xi : PDRB Subsektor Peternakan
Kabupaten Barru

X : Total PDRB Kabupaten
Barru

XI : PDRB Subsektor Peternakan
Sulawesi Selatan

X : Total PDRB Provinsi
Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor i dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan.
- 2) Jika nilai $LQ < 1$ maka sektor i dikategorikan sebagai sektor non-basis atau sektor non-unggulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besaran Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap PDRB ADHB pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap PDRB Kabupaten Barru Periode 2017-2021

Produk Domestik Regional Bruto ADHK				Kontribusi terhadap	
Tahu	Peternakan	Pertanian (tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, jasa	PDRB	Pertanian (%)	PDRB

		pertanian perburuan)	dan		
2017	4.408.308	150.120.532		416.998.381, 0	2,94 1,06
2018	4.845.460	158.130.762		446.654.117, 0	3,06 1,08
2019	4.239.698	165.271.943		479.742.968, 0	2,57 0,88
2020	1.458.641	166.267.212		4.839.116	0,88 30,01
2021	1.845.771	175.101.721		5.069.995	1,05 36,41
Rata-rata Per Tahun					2,10 13,91

Sumber: data diolah peneliti (2023)

Terlihat bahwa Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga konstan (ADHK) Peternakan Kabupaten Barru terhadap Pertanian pada tahun 2017 hingga tahun 2021 yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga konstan cenderung tumbuh terhadap PDRB Pertanian.

Pada data tersebut terlihat pula bahwa Subsektor Peternakan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pada tahun 2020-2021 berkontraksi secara signifikan sehingga menyebabkan kurangnya kontribusi sub sector peternakan terhadap sector pertanian pada tahun tersebut. Namun juga disertai kontraksi pada Total Produk Domestik Bruto Kabupaten Barru.

Depresiasi yang terjadi pada tahun 2020-2021 juga memicu penurunan PDRB kabupaten Barru hal ini menunjukkan bahwa hasil Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga konstan cenderung bergerak searah dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barru Nilai rata-rata dari hasil kontribusi terhadap Pertanian adalah 2,10 persen, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah 13,91 %.

Hasil *Location Quotient* (LQ) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru pada periode tahun 2017 sampai dengan periode 2021 bahwa besaran nilai LQ yang dihasilkan menunjukkan nilai lebih besar dari 1 (satu), dapat dilihat pada Tabel 2 yang menyajikan hasil LQ Peternakan sebagai berikut:

Tabel 2 : Hasil Location Quotient (LQ) Subsektor Peternakan Kabupaten Barru Periode 2017-2021

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto ADHB				
	Peternakan (xi)	PDRB Kab. Barru (x)	Peternakan sulse(X)	PDRB Sul Sel (XI)	LQ (%)
2017	4.408.308	416.998.381	148.689	288.814	2,053
2018	4.845.460	446.654.117	155.540	309.156	2,156
2019	4.239.698	479.742.968	167.638	330.506	1,742
2020	1.458.641	4.839.116	167.085	328.193	1,02
2021	1.845.771	5.069.995	167.629	343.403	1,41

Rata-rata Nilai LQ	1,7
---------------------------	------------

Sumber: Data Sekunder (diolah)

Berdasarkan hasil LQ menunjukkan bahwa Subsektor Peternakan merupakan Subsektor unggulan pada sektor Pertanian di Kabupaten Barru selama periode tahun 2017-2021, dan dengan nilai LQ > 1. Rata-rata Nilai LQ yang dianalisis berdasarkan jangka waktu 5 tahun menunjukkan rata-rata 1,7% sesuai dengan teori dari Bappenas (2003), menyatakan bahwa nilai $LQ_i > 1$ mengindikasikan ada kegiatan ekspor di sektor tersebut atau sektor basis, sedangkan $LQ_i < 1$ disebut sector non basis

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semua mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi pertanian meningkat. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

Sektor peternakan di Kabupaten Barru merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki sumbangsih. Keadaan membuktikan bahwa peternakan memiliki kontribusi atau sumbangsih yang cukup baik dan membantu perekonomian di Kabupaten Barru. Sehingga untuk mengembangkan laju perekonomian dapat memilih opsi strategi dalam meningkatkan kualitas peternakan baik

Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Sektor Pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, jasa perburuhan) dengan nilai rata-rata pertahun dalam periode 2017-2021 adalah sebesar 2,10 persen membuktikan bahwa peternakan memiliki kontribusi yang cukup besar dibidang pertanian, sedangkan untuk kontribusi Subsektor peternakan terhadap total produk PDRB ADHK sangat besar, hal tersebut membuktikan adanya peran yang sangat vital terhadap peningkatan ekonomi Kabupaten Barru dengan hasil menunjukkan 13,91 persen

kontribusi Subsektor Peternakan terhadap total Produk pertanian pada tahun 2020 sebesar 0,88 persen. Hal ini disebabkan karena perkembangan ternak yang statis atau tidak meningkat. Walaupun kontribusi subsektor Peternakan nilainya kecil tetapi peternakan di Wilayah Kabupaten Barru cukup berperan dan membantu meningkatkan perekonomian Daerah.

Pembudidayaan secara khusus yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 105/Permentan/ PD.300/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam membantu perkembangan peternakan di seluruh Indonesia dengan Budi Daya Sapi Potong di lingkup Perkebunan atau pekebun sawit dengan kontribusi yang sama adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kotoran ternak sapi untuk diolah menjadi pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
- b. Pemanfaatan Bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri.

Hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) maka dihasilkan nilai > 1 , yang berarti Subsektor Peternakan merupakan Subsektor unggulan yang harus diusahakan untuk terus menjadi sektor basis sebagai sumber daya yang dapat menggerakkan dan memacu pertumbuhan ekonominya serta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Barru.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sebesar 13,91 persen.
2. Peternakan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Barru. Berdasarkan data dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,7 .

Referensi :

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta, STIE YKPN.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta, Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Agustono. 2017. *Analisis Sektor Ditinjau Dari Peran Terhadap Pertumbuhan dan Stabilitas Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Agribisnis*. ISSN 1829-9946. Vol 9 (2): 284.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE.
- Budiarto, A, 1991. *Produktivitas Sapi Potong di Jawa Timur Tahun 1988-1989*. Tesis Pasca Sarjana, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. 2016. *Kabupaten Barru dalam Angka 2016*. BPS Kabupaten Barru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. 2018. *Kabupaten Barru dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Barru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2017*. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Barru.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha tahun 2012-2016*. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Barru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. *Sulawesi Selatan dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2017-2017*. CV Sekar Mulya
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. *Modul Isian Daerah untuk Simrenas*. <https://www.bappenas.go.id/files/3813/5230/1299/modul->

[isian- simrenas200811222312539470.pdf](#). Di akses pada tanggal 8 Januari 2018 pukul

23.16 Wita.

- Emilia & Imelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. FEUNJA
- Dewi, Noeke Korsiska. 2008. *Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi pada Prodi Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis Fakultas Pertanian USM Surakarta: tidak diterbitkan.
- Dinas Peternakan dan Pertanian. 2017. *Data Sektoral Peternakan dan Pertanian 2017*. Dinas Peternakan dan Pertanian, Sulawesi Selatan.
- Dinas Peternakan dan Pertanian. 2017. *Data Sektoral Peternakan dan Pertanian 2017*. Dinas Peternakan dan Pertanian, Kabupaten Barru.
- Murhaeni, H. Suriansyah. 2009. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*. Lks Bang Justitia. Surabaya.
- Nursetyo. 2017. *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)*, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Priyarsono, D.S, Sahara, dan Muhammad, F. 2007. *Ekonomi Regional*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Permentan Nomor 105 tahun 2014 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong Nomor 105/Permentan/300/8/2014. 2014. Mediel Blogie.
- Rustiadi, E. dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- Soekartawi, 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta, CV. Rajawali.
- Soekartawi, 1996. *Pembangunan Pertanian untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta, UI.
- Press.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta, Salemba Empat.
- Saefulhakim S. (2003). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Regional dan Perdesaan*. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Syahroni, Muhammad. 2005. *Analisis Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Agribisnis di Kabupten Dompu*. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Saragih B. 2008. *Kumpulan Pemikiran Agribisnis Berbasis Peternakan*. USESE Foundation dan Pusat Studi Pembangunan. IPB Bogor.
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional, Teoridan Aplikasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cetakan Keempat.
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta, Bina Aksara.
- Usman, W. Isnan F.N. dan Bayu M. 2001. *Pembangunan Pertanian di Era Globalisasi*. Yogyakarta, LP2KP Pustaka Karya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 2004. Fokus Media.

- Yulianto, P. dan C. saparianto. 2011. *Penggemukan Sapi Potong Hari per Hari*. Jakarta, Penebar Swadaya.
- Yulia. 2015. *Peran dan Strategi Pengembangan Subsektor Peternakan Dalam Pembangunan Ekonomi Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Tesis tidak di terbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.